

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PULAU BAGUK KECAMATAN PULAU BANYAK

Syukri, Herman Fithra, M. Akmal

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

Jln. Tengku Chik diTiro, No. 26, Lancang Garam, Lhokseumawe-24351

Korespondensi: e-mail: dilon9504@gmail.com

Abstrak

Pantai Pulau Baguk merupakan salah satu destinasi bahari yang cukup tua di Kecamatan Pulau Banyak di Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan salah satu unggulan yang aris di kelola dengan baik. Akan tetapi masih banyak permasalahan yang aris di selesaikan oleh Pemerintah Daerah seperti kurangnya fasilitas yang bisa membuat para wisatawan lokal dan wisatawan asing kurang menikmati suasana disaat berada dilokasi pantai. Dari penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pemda Kabupaten Aceh Singkil dalam pengembangan fasilitas objek wisata di Pantai Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak di Kabupaten Aceh Singkil penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara dan dekomendasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan model analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pengembangan Pariwisata di Pantai Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak di Kabupaten Aceh Singkil masih banyak pariwisata di Pantai Pulau Baguk kurang dana untuk melakukan pengembangan pariwisata dan juga sumber daya manusia yang terbatas dalam melakukan pengembangan pariwisata kemudian pihak dari pemerintah setempat kurang merespon keluhan dan masukan yang diberikan oleh dari pihak pengurus pariwisata di Pantai Pulau Baguk. Oleh karena itu pengembangan yang dilakukan oleh dari Pantai Pulau Baguk hanya memanfaatkan Dana Desa sebagai proses pengembangan pariwisata di Pantai Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak. Untuk menjadikan wisata Pulau Baguk sebagai wisata yang maju dan terfavorit bagi para pengunjung baik itu pengunjung lokal maupun pengunjung luar pemerintah setempat harus mendukung penuh dan memberikan masukan serta dana atau anggaran ke Pantai Pulau Baguk supaya proses pengembangannya lebih cepat dan baik serta fasilitas dan sarana prasana di pantai itu akan lebih baik dan lebih menarik sehingga membuat para pengunjung lebih nyaman dan tenang di saat melakukan liburan ke Pantai Pulau Baguk kemudian Pantai Pulau Baguk lebih indah dan lebih mempersona.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang dapat menunjang perekonomian suatu negara industri pariwisata memegang peranan penting selain meningkatkan devisa negara pariwisata juga membuka peluang usaha, peluang kerja, menambah penerimaan pajak Negara dan meningkatkan rotasi daya beli terhadap unit usaha masyarakat. Undang-undang Nomor 10

tahun 2009 pada pasal 1 menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai bentuk kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai macam Fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah daerah maupun Pemerintah pusat.

Provinsi Aceh adalah salah satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki keindahan alamnya yang sangat beragam. Meskipun saat ini belum begitu banyak dikenal oleh para wisatawan asing maupun lokal. Akan tetapi salah satu Provinsi Aceh yang memiliki beberapa objek wisata yang sangat menarik dan indah alamnya adalah Kabupaten Aceh Singkil.

Sampai saat ini pembangunan pariwisata di Kabupaten Pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Singkil dipayungi dalam Qanun Aceh Singkil Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Aceh Singkil. Dalam Pasal 5 Qanun tersebut menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Singkil meliputi : mewujudkan destinasi pariwisata bernuansa sebagai sektor unggulan, mengoptimalkan potensi alam, budaya masyarakat, sejarah, dan industri keratif sebagai identitas pariwisata Kabupaten, meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata, memperkuat sistem industri pariwisata Kabupaten yang terpercaya melalui pembangunan industri kreatif masyarakat, peningkatan investasi dibidang pariwisata dan kerjasama antar usaha pariwisata, mewujudkan industri pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian kabupaten, mengembangkan pemasaran pariwisata yang beretika, informatif, komunikatif, dan mengikuti perkembangan teknologi, meningkatkan jaringan pariwisata yang efektif dan efisien, berskala lokal, nasional, dan internasional, mewujudkan Aceh Singkil belum berjalan dengan optimal berdasarkan data objek wisata di Kabupaten Aceh Singkil, banyak pengelolaan wisata diberbagai tempat wisata belum memiliki fasilitas yang lengkap serta beberapa potensi-potensi wisata yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas pariwisata.

Fenomena dilapangan adalah pemerintah masih kurang meningkatkan potensi wisata Pantai Pulau Banyak, karena sarana prasarana masih kurang dilokasi wisata, padahal kalau Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil serius mengembangkan sektor pariwisata tentu akan menjadikan program wisata sebagai industri bagi Singkil dan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkepanjangan. Misalnya dengan majunya sebuah objek wisata tentu ada setoran dan juga ada juru jalan kalau kita pengen melihat semua Pulau-pulau kecil yang ada dilokasi Pantai Pulau Banyak. Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah dan sektor terkait lainnya akan menambah dan menunjang tinggi pendapatannya. Akan tetapi kalau pariwisata ini tidak menjadi tempat sentral yang menguntungkan secara Ekonomi terjadi strategis bagi Pendapatan Asli Daerah.

Kajian Terdahulu: Landasan Teoritis

Teori merupakan landasan yang teramat penting dalam memahami, menafsirkan dan memaknai data, oleh karena itu untuk memudahkan penafsiran data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

Implementasikan Kebijakan Publik

George Edwards III (2002:46) mengungkapkan ada empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku dan struktur birokratik. Keempat faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses implementasi, keempat faktor tersebut saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung keefektifan implementasi kebijakan.

Dalam pengambilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Menurut Nigro dalam Islamy (2004:24), pengambilan kebijakan bukanlah pekerjaan yang sederhana dan mudah, setiap administrasi dituntut mempunyai keahlian tanggung jawab, kemauan sebagai pembuat kebijakan dengan segala resikonya baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Melihat adanya beberapa macam nilai yang melandasi tingkah laku pembuat keputusan, menurut Anderson dalam Islamy (2004:27) faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan yaitu:

- a. Nilai politik, keputusan/ kebijakan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok atau kelompok kepentingan tertentu.
- b. Nilai organisasi, keputusan/ kebijakan dibuat atas dasar yang dianut organisasi, seperti balas jasa (rewards)
- c. Nilai pribadi, seringkali keputusan/kebijakan dibuat atas dasar nilai pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status, reputasi, kekayaan, dan sebagainya.
- d. Nilai kebijakan, keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan tentang kepentingan publik atau pembuatan kebijaksanaan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Nilai ideologi, nilai ideologi misalnya nasionalisme dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan seperti misalnya kebijaksanaan dalam dan luar negeri.

Proses analisa kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual (Subarsono, 2005: 8).

Anderson dalam subarsono (2005:12), menetapkan proses kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Formulasi masalah (problem formulation): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
- b. Formulasi kebijakan (formulation): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- c. Penentuan kebijakan (adoption): bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isu kebijakan yang telah ditetapkan?
- d. Implementasi (implementation): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- e. Evaluasi (evaluation): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan

Pengertian Implementasi Kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi menurut Edward III diatas, maka Van Meter dan Van Horn (dalam Abdul Wahab , 2006:79) juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana, sikap para pelaksana dan lingkungan ekonomi, Sosial, dan Politik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan atau kejadian melalui proses berfikir induktif (Fauzi, 2008:26). Alasan memilih metode penelitian kualitatif adalah karena dalam kajian ini dilakukan secara observasi langsung kelapangan untuk melakukan penelitian langsung dengan informan atau subjek karena masalah dalam penelitian ini masih belum jelas untuk kebenarannya dan juga belum ada data yang cocok tentang masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dikaji dengan cara mendeskripsikan, menganalisis serta menggambarkan sesungguhnya permasalahan yang diteliti dengan menggunakan kalimat sehingga penulis menemukan jawaban dari permasalahan yang terkait.

Hasil dan Pembahasan

Potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Singkil salah satu kabupaten layak untuk dikembangkan dan menjadikan wisata yang lebih menarik untuk dikunjungi oleh para wisata asing dan para wisata lokal, dan tidak lagi diherankan dengan indah dan bersihnya wisata yang ada di Pulau Baguk dan sangat patut untuk dikembangkan. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Singkil di payungi oleh Qanun Aceh Singkil Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Aceh Singkil.

Pengembangan pariwisata yang dilakukan di Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Akan lebih baik lagi dan rapi dan teratur dan tertata dengan baik dari pada awal sebelumnya, dalam arti terjadi pengembangan destinasi wisata ke arah yang lebih baik melalui penataan destinasi wisata yang mencakup pengembangan prasarana umum, fasilitas umum pendukung pariwisata dan fasilitas pariwisata untuk menunjang kegiatan pariwisata serta melalui promosi. Peneliti mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan kerangka konsep dari model implementasi kebijakan Edward III.

Pemahaman mengenai implementasi bisa dihubungkan dengan suatu peraturan/kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebuah kebijakan akan terlihat manfaatnya apabila sudah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Dari semua proses kebijakan, implementasi adalah hal yang sakral. Kebijakan diturunkan dalam bentuk program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan berakhir pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Seperti halnya kebijakan pengembangan pariwisata Pantai Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak di Kabupaten Aceh. Masih banyak objek wisata di Aceh Singkil yang fasilitas pariwisatanya belum memadai. Penyediaan fasilitas di destinasi wisata tentunya dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan pengunjung yang datang berwisata. Apabila fasilitas yang ada tidak memadai, tentunya mengakibatkan adanya ketidak puasan pengunjung serta menunjukkan bahwa belum maksimalnya implementasi kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata. Hal ini disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang menyebabkan belum maksimalnya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Pantai Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut yaitu terdiri dari sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan komunikasi.

Di dalam melakukan kebijakan pengembangan pariwisata Pantai Pulau Baguk tentu tidak berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan pasti ada hambatan-hambatan atau tantangan yang kita dapatkan disaat melakukan proses pembuatan kebijakan pengembangan pariwisata. Menurut Barreto dan Giantari (2015:34) pengembangan pariwisata adalah suatu usaha

untuk mengembangkan atau menunjukkan obyek wisata agar, objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Keterbatasan anggaran dalam pengembangan pariwisata pantai pulau bagus kecamatan pulau banyak yang membuat pengembangan pariwisata menjadi lambat berkembang dikarenakan pemerintah setempat kurang merespon keluhan dan kekurangan dari pantai pulau bagus.

Pengembangan pariwisata dipantai pulau bagus hanya memanfaatkan anggaran dari dana desa setempat. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan pengurus setempat dalam melakukan pengembangan pariwisata dipantai pulau bagus. Masih banyak para anggota yang tidak sekolah yang sesuai dengan latar belakang pendidikan pariwisata makanya proses pengembangan dan tingkat promosi kurang lebih paham dan mengerti disebabkan para pekerja disitu tidak berlatarbelakang berpendidikan sekolah atau kuliah tentang pariwisata. Itulah sebabnya kekurangan promosi yang dilakukan oleh Pantai Pulau Bagus.

Kesimpulan

Proses pengembangan yang dilakukan oleh pulau banyak untuk mengembangkan pantai pulau bagus sangatlah memerlukan waktu yang sangat panjang serta juga pendidikan kepada masyarakat yang berada didaerah pantai pulau bagus, supaya bisa mendapatkan ilmu dan proses dalam pengembangan pariwisata dan diperlukan juga mahasiswa yang berjurusan pariwisata, guna untuk mendidik dan membimbing masyarakat atau kelompok yang dalam pengembangan pariwisata di pantai pulau bagus tujuannya supaya pantai pulau bagus bisa berkembang dan maju dan menarik lagi para pengunjung lebih banyak dari pada sebelumnya.

Sumber dana atau finansial bersumber ini juga salah satu faktor penghambat pengembangan pantai pulau bagus kecamatan pulau banyak kabupaten aceh singkil. Dimana dalam pengembangan pantai pulau bagus ini sangat di perlukan keangan guna untuk mengembangkan wisata menjadi lebih baik dan lebih teratur dan rapi dari pada sebelumnya, dan juga menambah daya tarik bagi pengunjung lebih banyak dari pada yang lalu. Kita ketahui bahwa anggaran yang di gunakan untuk pengembangan pulau bagus itu cuman bersumber dari anggaran desa. Kita ketahui bahwasanya anggaran yang di gunakan sangatlah kecil jumlahnya. Sehingga dalam proses pengembangan pun hanya bertahap-tahap yang dilakukan oleh kepala BUMDES.

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Barreto, M., Giantar, I.G.A 2015. "Starategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas Di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro, Timor Leste". E-jurnal Ekonomi dan Bisnis. 4(11): 779.
- Chaizi, Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo.
- Dunn, William N. 2003 . *Pengantar Analisis Kebijakan Public Edisi Kedua*. Yogyakarta: UGM Press.
- Edward III, George C. 2002. *Model Pendekatan Implementasi*. Congresinal: Quarterly Press.
- Fauzi, DKK. 2011. *Penduan Penulisan Skripsi*. Lhokseumawe: FISIP Universitas Malikussaleh.
- Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Nyoman, S Pedit. 2002 *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Qanun Aceh Singkil Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wahab, Salah, (2003) *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: Pradaya Pratama.
- Wahab, Solichin Adbul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Yoeti, Oka A. 2006. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.